

ABSTRAK

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas desentralisasi. Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah tetap memerlukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat guna menjamin keselarasan antara kebijakan daerah dengan kepentingan nasional. Akan tetapi pembinaan dan pengawasan masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya dalam ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat yang menunjukkan belum optimalnya kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk sinkronisasi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintahan Daerah serta menganalisis pembinaan dan pengawasan dalam desentralisasi fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*), dengan cara menjelaskan, menginterpretasikan menemukan aturan hukum, pandangan-pandangan oleh pakar hukum sehingga mampu menghasilkan argumentasi baru untuk memecahkan isu permasalahan. Dengan pendekatan menggunakan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara tujuan normatif pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat dengan terwujudnya kemandirian fiskal daerah. Adanya dominasi kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengaturan kebijakan fiskal dan mekanisme transfer ke daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan terkait pembinaan dan pengawasan guna menjadikan instrumen yang tidak membatasi otonomi fiskal daerah, akan tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan dan menjamin kemandirian fiskal yang tetap selaras dengan kepentingan nasional.

Kata Kunci: Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintahan Daerah, Desentralisasi Fiskal.

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy within the constitutional framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia grants regional governments the authority to regulate and administer governmental affairs based on the principle of decentralization. Nevertheless, the implementation of regional autonomy continues to require guidance and supervision by the Central Government to ensure that regional policies remain consistent with national interests. In practice, however, the guidance and supervision system continues to encounter various challenges, particularly the persistent fiscal dependence of regional governments on transfer funds from the Central Government, which reflects the suboptimal level of regional fiscal independence.

This study examines the synchronization of guidance and supervision exercised by the Central Government over Regional Governments and analyzes their implementation in the context of fiscal decentralization. This research employs a normative juridical (legal) research method by examining, interpreting, and identifying legal norms, doctrines, and scholarly opinions to formulate legal arguments for resolving the issues under study. The research applies the statutory approach, conceptual approach, and historical approach.

The findings indicate that there is a lack of synchronization between the normative objectives of guidance and supervision by the Central Government and the realization of regional fiscal independence. This condition is reflected in the dominant authority of the Central Government in regulating fiscal policies and the mechanism of intergovernmental fiscal transfers. Therefore, it is necessary to realign the system of guidance and supervision so that it functions not as an instrument restricting regional fiscal autonomy, but rather as a mechanism to promote and safeguard regional fiscal independence while maintaining consistency with national interests.

Keywords: *Guidance and Supervision, Regional Government, Fiscal Decentralization.*